

## RINGKASAN

Korupsi pada pengadaan barang dan jasa merugikan berbagai pihak seperti pemerintah, pelaku usaha, dan tentunya adalah masyarakat. *Construction Sector Transparency Initiative (CoST)* memperkirakan bahwa setiap tahun kerugian akibat korupsi pengadaan barang dan jasa mencapai USD 6 Triliun, kerugian ini diperkirakan berlangsung hingga tahun 2030. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi apakah terdapat indikasi adanya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode langsung di Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud).

Alat yang digunakan untuk mendeteksi potensi *fraud* dalam penelitian ini adalah *Benford's Law* yang merupakan hukum yang bisa memprediksi frekuensi munculnya angka tertentu dalam suatu data. *Benford's Law* mengatakan bahwa frekuensi kemunculan angka pada digit tertentu tidaklah sama. Penelitian ini menggunakan *add-ins ActiveData* yang terdapat dalam *software* Microsoft Excel. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari *website* <https://simpler-lpse.kemdikbud.go.id/>.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat adanya indikasi terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa dengan metode langsung di Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud). Nilai pengadaan yang paling berpotensi adanya *fraud* yaitu nilai pengadaan yang memiliki dua digit pertama berupa angka 19 seperti Rp 1.900.000, Rp 19.000.000, dan Rp 198.000.000. Metode yang paling banyak digunakan dalam *fraud* pengadaan barang dan jasa adalah *mark-up* anggaran, HPS lebih tinggi dibanding nilai pasar, penyuapan, hingga adanya persekongkolan antara pemenang tender dengan PPK.

Kata Kunci: *fraud*, korupsi, *benford's law*, pengadaan barang dan jasa, Kemendikbud.

## SUMMARY

*Corruption in the procurement of goods and services is detrimental to various parties such as the government, business actors, and of course the community. The Construction Sector Transparency Initiative (CoST) estimates that each year the losses due to corruption in the procurement of goods and services reach USD 6 trillion, this loss is estimated to last until 2030. This study aims to detect whether there are indications of fraud in the procurement of goods and services using the direct method in Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud).*

*The tool used to detect potential fraud in this study is Benford's Law, which is a law that can predict the frequency of occurrence of certain numbers in data. In Benford's Law, it is said that the frequency of appearance of numbers in certain digits is not the same. This research uses ActiveData add-ins contained in Microsoft Excel. The data source used is secondary data from the website <https://simplerlpse.kemdikbud.go.id/>.*

*The results of this study indicate that there are indications of fraud in the procurement of goods and services using the direct method at the Satuan Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Satker Kemendikbud). The procurement values with the most potential for fraud were the procurement values that had the first two digits of the number 19, such as Rp.1,900,000, Rp.19,000,000 and Rp.198,000,000. The methods most widely used in fraud in the procurement of goods and services are budget mark-up, HPS being higher than market value, bribery, and conspiracy between the tender winner and the PPK.*

*Keyword: fraud, corruption, benford's law, procurement of goods and services, Kemendikbud.*